



ISSN:2541-0180

Volume 3 (1) Maret 2018

JAE

Jurnal Akuntansi & Ekonomi

1. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap *return* saham dengan *return on asset* sebagai variabel *intervening* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sektor industri rokok.
ZACHARI ABDALLAH
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci
2. Analisis penilaian tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan metode RGEC tahun 2012 - 2016
¹ AHMAD KUDHORI, ² RETNO DWI AMELIA
Politeknik Negeri Madiun
3. Pembelajaran akuntansi berbasis spiritualitas, budaya dan kearifan lokal
M. ANAS
Universitas Nusantara PGRI Kediri
4. Analisis komparasi perilaku ETIS mahasiswa akuntansi STIE Sakti Alam Kerinci dengan STIE Sumatera Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
ELEX SARMIGI
STIE Sakti Alam Kerinci
5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dan keterlambatan publikasi laporan keuangan pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar DI BURSA EFEK INDONESIA
MAYA NOVITASARI
Universitas PGRI Madiun
6. Analisis PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan PEMDA Se-Jawa Barat
PUTRI PUSPITA AYU
Universitas Swadaya Gunung Jati
7. Analisis kinerja keuangan dan tingkat kemandirian pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon
TIKA SEPTIANI
Universitas Swadaya Gunung Jati



Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)

ISSN: 2541-0180

The Journal is published by Department of Accounting Faculty of Economics in collaboration with LP2M University of Nusantara PGRI Kediri. This Journal focused on Accounting and Economics Studies. This Journal is published twice a year on September and March.

Editor in Chief:

Faisol (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Email: faisol@unpkediri.ac.id

Editorial Advisory Board:

Dr. Ary Kamayanti (The University of Brawijaya Malang)

Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si. (The University of Jember)

Drs. Ec. Sugeng, M.M., M.Ak. CA. ACPA (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Section Editor

Amin Tohari, S.Si, M.Si. (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Erna Puspita, S.E., M.Ak. (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Copy Editor:

Andy Kurniawan, S.E., M.Ak. (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Linawati, S.E., M.Si, (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Layout Editor:

Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M. (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Sigit Wisnu, S.E., M.M., (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Proof reader

Dyah Ayu Paramitha, S.E., M.Ak. (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Maratus Solikah, S.E.,M.Ak. (The University of Nusantara PGRI Kediri)

Editorial Office:

Department of Accounting Faculty of Economics University of Nusantara PGRI Kediri

Jl. KH. Achmad Dahlan No 76 Telp. (0354) 771576 Kediri.

Email: jurnal_jae@unpkediri.ac.id

Website: <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi>

Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)

Wahana publikasi karya tulis ilmiah di bidang Akuntansi dan Ekonomi

DAFTAR ISI (CONTENTS)

	Halaman (Page)
1. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap <i>return</i> saham dengan <i>return on asset</i> sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sektor industri rokok. ZACHARI ABDALLAH Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci	1-11
2. Analisis penilaian tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan metode RGEC tahun 2012 - 2016 ¹ AHMAD KUDHORI, ² RETNO DWI AMELIA Politeknik Negeri Madiun	12-34
3. Pembelajaran akuntansi berbasis spiritualitas, budaya dan kearifan lokal M. ANAS Universitas Nusantara PGRI Kediri	35-42
4. Analisis komparasi perilaku ETIS mahasiswa akuntansi STIE Sakti Alam Kerinci dengan STIE Sumatera Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ELEX SARMIGI STIE Sakti Alam Kerinci	43-62
5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dan keterlambatan publikasi laporan keuangan pada perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar DI BURSA EFEK INDONESIA MAYA NOVITASARI Universitas PGRI Madiun	63-79
6. Analisis PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan PEMDA Se-Jawa Barat PUTRI PUSPITA AYU Universitas Swadaya Gunung Jati	80-96
7. Analisis kinerja keuangan dan tingkat kemandirian pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon TIKA SEPTIANI Universitas Swadaya Gunung Jati	97-112

Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon

Tika septiani
Universitas Swadaya Gunung Jati
tikapramana@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the unsettled regional autonomy, require local governments to put greater attention on performance management of the finance area. The level of independence of local Government can be reflected in the financial management area is good, accountable and transparent, therefore needed financial performance measurement to assess the accountability of the Government. This research using secondary data obtained from Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Representatives in West Java. The type of Data that is used in the form: Pendaatan the original Data areas, Data revenues, Routine Shopping Data, and Data development spending Kabupaten dan Kota Cirebon.. Methods of analysis used in this study is the analysis of the ratio of the Financial Independence of the region, the ratio, the ratio of effectiveness of activity, and the ratio of Growth to know the regional financial management performance and independence Kabupaten dan Kota Cirebon. Based on the results of the analysis and discussion of which has been described, the average performance of financial management and the level ratio of the Financial Independence of kabupaten and kota Cirebon on the basis of the analysis of financial ratios is good. It is visible from the ratio of the Financial Independence kabupaten and kota Cirebon who despite having average still low i.e. by 25%, but overall the ratio of independence has experienced an increase of years up to the year 2013 2015.

ABSTRAK

Dengan terapkannya otonomi daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat tercermin dari pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan transparan, maka dari itu diperlukan pengukuran kinerja keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk: Data Pendapatan Asli Daerah, Data Pendapatan, Data Belanja Rutin, dan Data Belanja Pembangunan Kabupaten dan Kota Cirebon. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian Kabupaten dan Kota Cirebon. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat rasio kemandirian daerah kabupaten dan Kota Cirebon berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Hal tersebut terlihat dari rasio kemandirian kabupaten cirebon dan kota Cirebon yang walaupun memiliki rata-rata yang masih rendah yakni sebesar 25%, namun secara keseluruhan rasio kemandirian telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, tingkat kemandirian, kinerja keuangan daerah

PENDAHULUAN

Dengan diberikannya wewenang kepada perangkat daerah dalam mengurus sendiri kekayaan daerahnya, maka daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangan dibandingkan sebelum diterapkannya otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah bisa lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah diantaranya adalah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan untuk pembiayaan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat tercermin dari pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan transparan, maka dari itu diperlukan pengukuran kinerja keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis rasio keuangan pemerintah daerah, yang hasilnya dipergunakan untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah dan belanja daerahnya. Agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan informasi terkait keuangan daerah dan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan kabupaten dan kota Cirebon sebagai objek penelitian, agar dapat menganalisis kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandiriannya serta membandingkan kinerja keuangan dan tingkat kemandirian antara dua pemerintahan daerah tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon (Tahun Anggaran 2014-2015)”**. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian di Pemerintahan kabupaten dan kota Cirebon (Tahun Anggaran 2014-2015)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan daerah

Sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah lebuh ditujukan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Dan dengan adanya reformasi pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat. Sebelumnya, reformasi audit keuangan telah ada namun tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah sistem anggaran tidak memasukan kinerjanya. Dan di era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan audit atas LKPD menjadi lebih baik.

Pengelolaan keuangan daerah

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut **Abdul Halim** (2004;21), adalah: “pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan daerah tersebut.” Selain itu otonomi daerah memberikan wewenang untuk menggunakan kekayaan daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keuangan daerah maka pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk LKPD.

Otonomi daerah

Dua manfaat desentralisasi :

1. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat daerah, prakarsa dan tingkat kreativitas pembangunan, serta memicu pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia dengan memaksimalkan pengelolaan kekayaan, sumber daya, dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

2. Dengan diterapkannya dsentralisasi maka akan terjadi perpindahan peran dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kekayaan keuangan daerah hal ini dapat meningkatkan alokasi kekayaan daerah yang lebih produktif.

Dampak penerapan desentralisasi adalah terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah bagi semua pemangku kepentingan daerah Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi yang memadai.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan hasil kerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah guna memenuhi kebutuhannya, sehingga bisa terwujud pelayanan prima bagi masyarakat dan juga melaksanakan pembangunan daerah yang menyeluruh tanpa mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud diantaranya untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan cara berkonsentrasi pada setiap unit kerja; pengalokasian kekayaan daerah dalam pengambilan keputusan; menciptakan akuntabilitas public dan meningkatkan komunikasi antar lembaga.

Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2002), ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar daerah (pemerintah pusat dan provinsi) diukur dengan rasio kemandirian daerah. Jika pemerintah daerah banyak bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat dan provinsi, bisa dikatakan daerah tersebut tidak mandiri sehingga rasio kemandirian daerahnya menjadi tinggi, begitupun sebaliknya. Partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya juga dapat dilihat dengan tingkat rasio kemandirian. Bentuk dari partisipasi masyarakat adalah dengan taat membayar pajak daerah dan retribusi sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hersey dan Kenneth (dalam Halim, 2001:168) dalam penerapan desentralisasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bisa digambarkan menjadi 4 pola sebagai berikut:

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu pemerintah pusat lebih banyak campur tangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga daerah tidak mandiri
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat hanya berupa pemberian konsultasi kepada pemerintah daerah

- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu peran pemerintah pusat semakin kecil dalam pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah daerah sudah dianggap mampu untuk melaksanakan pengelolaan keuangannya sendiri
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu sudah tidak adanya campur tangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena daerah sudah sangat mampu melaksanakan otonomi daerahnya.

Tabel 1
Kriteria Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Mahsun Moh, 2006

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan PAD yang dianggarkan sebelumnya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan efektif jika nilai rasio efektivitas ini lebih dari 100% . Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002:129) Berikut ini adalah kriteria penilaian efektivitas kinerja keuangan:

Tabel 2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja	Keuangan Kriteria
100% - ke atas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Mahsun Moh, 2006

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah analisis perbandingan antara besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima periode tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan efisien jika nilai rasio efisiensi ini kurang dari 100%. Semakin rendah rasio efisiensi

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria penilaian efisiensi kinerja keuangan menurut Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% - ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

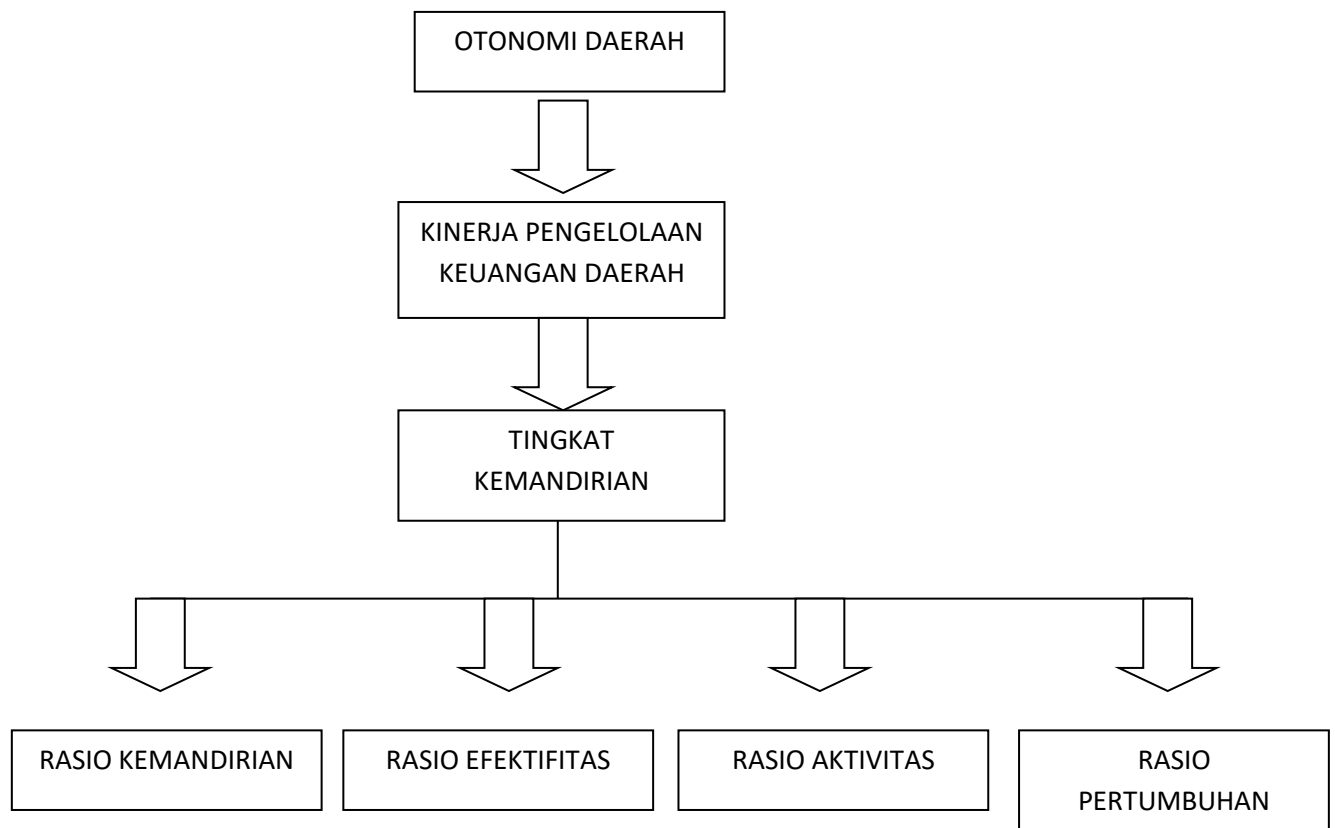
Rasio Aktivitas

Rasio ini menganalisis kemampuan pemerintah daerah dalam mendahulukan penggunaan dana kekayaan daerah terhadap belanja pembangunan dan belanja rutin dengan optimal. Semakin banyak dana yang digunakan untuk belanja rutin maka belanja investasi/pembangunan akan semakin rendah. Itu artinya dana yang digunakan untuk pembangunan sarana prasarana umum akan semakin kecil.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) menganalisis seberapa mampu pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat diketahui pos pos keuangan mana yang memerlukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan. Jika pemerintah daerah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya maka rasio pertumbuhannya akan selalu meningkat juga setiap tahunnya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk: Data Pendaatan Asli Daerah, Data Pendapatan, Data Belanja Rutin, dan Data Belanja Pembangunan Kabupaten dan Kota Cirebon.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian Kabupaten dan Kota Cirebon.

Operasionalisasi Variabel

Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Indikator Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Indikator Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Indikator Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Indikator Rasio pertumbuhan terdiri dari

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun p} - \text{PAD tahun p-1}}{\text{PAD tahun p-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

$$= \frac{\text{Pendapatan tahun p} - \text{pendapatan tahun p-1}}{\text{Pendapatan tahun p-1}} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah

$$= \frac{\text{Belanja rutin tahun p} - \text{belanja rutin tahun p-1}}{\text{Belanja rutin tahun p-1}} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan Daerah

$$= \frac{\text{blj pembangunan tahun p} - \text{blj pembangunan tahun p-1}}{\text{Belanja pembangunan tahun p-1}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas tentang pencapaian kinerja keuangan dan tingkat kemandirian daerah di kabupaten dan kota Cirebon dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2013-2015. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio sebagai berikut:

Rasio Tingkat Kemandirian Daerah

Rasio tingkat kemandirian daerah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat/ provinsi Rasio ini diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Berikut ini perbandingan rasio kemandirian kabupaten dan kota Cirebon:

Tabel 4

Rasio Tingkat Kemandirian

RASIO KEMANDIRIAN	KABUPATEN CIREBON			KOTA CIREBON		
	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013
PAD (Rp)	478,690,101,565	452,870,109,028	250,848,893,157	319,893,842,205	298,540,660,324	206,019,069,726
BANTAUAN PEMPROV (Rp)	1,774,772,969,945	1,597,000,582,736	1,432,783,616,000	835,644,585,827	676,198,182,179	596,332,737,530
RASIO	27%	28%	18%	38%	44%	35%
KETERANGAN	KONSULTATIF	KONSULTATIF	INSTRUKTIF	KONSULTATIF	KONSULTATIF	KONSULTATIF

Sumber: IHPS BPKP Jabar (diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, rasio kemandirian daerah kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon cenderung mengalami peningkatan namun berfluktuatif. Peran serta pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Cirebon sudah mulai berkurang, hal ini terlihat dari persentase rasio kemandirian yang semakin meningkat. pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2013 s/d 2015 masih sangat rendah dengan rata-rata 24% kurang dari 25% dan Kota Cirebon dengan rata-rata rasio kemandirian 39%.

Turunnya rasio kemandirian kota Cirebon pada tahun 2015 disebabkan oleh meningkatnya bantuan pemprov dari semula 2014 Rp 298.540.660.324 di tahun 2015 menjadi Rp 853.664.585.827. Namun dilihat dari rata-rata tingkat rasio kemandirian Pemerintah daerah kabupaten dan kota Cirebon, masing-masing pemda ini dikategorikan memiliki pola

hubungan konsultatif dengan pemerintah pusat, yang artinya pemerintah pusat sudah tidak terlalu dominan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kota dan kabupaten Cirebon hanya bersifat konsultasi.

Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah kota dan kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan sebelumnya berdasarkan potensi yang sebenarnya dimiliki daerah. Berikut ini adalah table perbandingan rasio efektifitas kabupaten dan kota Cirebon:

Tabel 5
Rasio Efektivitas

RASIO EFEKTIVITAS	KABUPATEN CIREBON			KOTA CIREBON		
	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013
REALISASI PAD (Rp)	478,690,101,565	452,870,109,028	250,848,893,157	319,893,842,205	298,540,660,324	206,019,069,726
ANGGARAN PAD (Rp)	437,911,993,056	424,593,340,403	257,537,874,736	305,676,575,000	265,668,901,051	189,962,661,806
RASIO	109%	107%	97%	105%	112%	108%
KETERANGAN	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF

Sumber: IHPS BPKP Jabar (diolah)

Dari perhitungan rasio efektifitas di atas, efektifitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Cirebon sangat efektif sebab realisasi PAD di atas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2013-2015. Hanya di tahun 2013 saja pemerintahan daerah kabupaten Cirebon memiliki rasio efektifitas 97% yang berarti, pemerintah daerah kabupaten Cirebon efektif mewujudkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan sebelumnya berdasarkan potensi yang sebenarnya dimiliki daerah. Secara umum, efektifitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan Kota Cirebon tahun 2013-2015 cukup baik sebab realisasinya sudah di atas 100%.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menganalisis perbandingan antara besarnya pengorbanan/pengeluaran yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pada periode tersebut. Berikut ini adalah table rasio efisiensi kota dan kabupaten Cirebon:

Tabel 6
Rasio Efisiensi

RASIO EFISIENSI	KABUPATEN CIREBON			KOTA CIREBON		
	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013
BIAYA PEMUNGUTAN PAD (Rp)	5,855,741,596	4,209,630,707	4,913,949,280	5,710,255,350	5,175,257,599	4,217,181,650
REALISASI PAD (Rp)	478,690,101,565	452,870,109,028	250,848,893,157	319,893,842,205	298,540,660,324	206,019,069,726
RASIO	1.22%	0.93%	1.96%	1.79%	1.73%	2.05%
KETERANGAN	SANGAT EFISIEN	SANGAT EFISIEN	SANGAT EFISIEN	SANGAT EFISIEN	SANGAT EFISIEN	SANGAT EFISIEN

Sumber: IHPS BPKP Jabar (diolah)

Dari tabel rasio efisiensi diatas dapat dilihat bahwa efisien pengelolaan keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten Cirebon sudah baik sebab besarnya rasio efisiensi di bawah 60%. Pada tahun 2013-2015 rasio efisiensi terus mengalami penurunan. Untuk kota cirebon pada tahun 2013 rasio efisiensi sebesar 2.05%, di tahun anggaran 2014 sebesar 1.73%, tahun 2015 sebesar 1.79%. Sedangkan, untuk kabupaten Cirebon pada tahun 2013 rasio efisiensi sebesar 1,96%, di tahun anggaran 2014 sebesar 0.93%, tahun 2015 sebesar 1.22%.

Tahun 2014 kabupaten cirebon memiliki rasio sebesar 1,92%. Namun pada tahun 2015 justru meningkat sebesar 1,22% dikarenakan total pengeluaran untuk memungut PAD juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan besarnya pengeluaran atau biaya untuk memungut PAD di tahun 2014 belum mampu merealisasikan penerimaan PAD secara lebih maksimal dibanding tahun sebelumnya.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menganalisis kemampuan pemerintah daerah dalam mengutamakan penggunaan dana kekayaan daerah terhadap belanja pembangunan dan belanja rutin dengan optimal. Berikut ini table rasio aktivitas kota dan kabupaten Cirebon:

Tabel 7
Rasio aktivitas

RASIO AKTIVITAS	KABUPATEN CIREBON			KOTA CIREBON		
	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013
ANGGARAN BELANJA (Rp)	3,078,307,143,175	2,768,016,911,386	2,344,325,889,241	1,537,537,531,490	1,359,770,980,274	1,075,340,864,679
REALISASI BELANJA RUTIN (Rp)	2,246,109,243,046	2,167,593,321,409	1,932,345,291,946	1,090,167,647,627	959,185,971,321	805,537,224,798
REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN (Rp)	439,768,587,939	323,301,978,738	324,170,935,193	264,561,671,148	235,233,597,636	169,462,451,965
RASIO BELANJA RUTIN	73%	78%	82%	71%	71%	75%
RASIO BELANJA PEMBANGUNAN	14%	12%	14%	17%	17%	16%
KETERANGAN						

Sumber: IHPS BPKP Jabar (diolah)

Dari perhitungan rasio aktivitas di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dana ditujukan untuk memenuhi keperluan belanja rutin (belanja tidak langsung). Dalam waktu 3 tahun anggaran yakni pada tahun 2013 s/d 2015 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin lebih tinggi dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan (belanja langsung) kabupaten Cirebon yaitu sebesar 77.7% dan untuk kota Cirebon 72.3%. Sedangkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan hanya sebesar 13.3% untuk kabupaten Cirebon dan 16.7% untuk kota Cirebon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kabupaten dan kota Cirebon lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan. Maka diperlukan minimalisasi anggaran untuk belanja rutin guna dialokasikan untuk belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat kabupaten dan kota Cirebon.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menganalisis seberapa mampu pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahunnya. Berikut tabel rasio pertumbuhan kota dan kabupaten Cirebon:

Tabel.8

Data Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi Penerimaan Pendapatan, Realisasi Belanja Rutin, dan Realisasi Belanja Pembangunan Kabupaten

KETERANGAN	KABUPATEN CIREBON			KOTA CIREBON		
	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	478,690,101,565	452,870,109,028	250,848,893,157	319,893,842,205	298,540,660,324	206,019,069,726
TOTAL PENDAPATAN (Rp)	3,161,706,817,061	2,733,579,597,223	2,316,011,665,105	1,403,866,685,439	1,234,067,584,543	1,009,950,399,239
BELANJA RUTIN (Rp)	2,246,109,243,046	2,167,593,321,409	1,932,345,291,946	1,090,167,647,627	959,185,971,321	805,537,224,798
BELANJA PEMBANGUNAN (Rp)	439,768,587,939	323,301,978,738	324,170,935,193	264,561,671,148	235,233,597,636	169,462,451,965

Sumber: IHPS BPKP Jabar (diolah)

Tabel 9

Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan

RASIO PERTUMBUHAN	KABUPATEN CIREBON			KOTA CIREBON		
	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013	TAHUN 2015	TAHUN 2014	TAHUN 2013
RASIO PERTUMBUHAN PAD (Rp)	5.70%	80.54%	9.07%	7.15%	44.91%	37.81%
RASIO PERTUMBUHAN PENDAPATAN (Rp)	15.66%	18.03%	16.13%	13.76%	22.19%	15.80%
RASIO PERTUMBUHAN BELANJA RUTIN (Rp)	3.62%	12.17%	18.72%	13.66%	19.07%	11.93%
RASIO PERTUMBUHAN BELANJA PEMBANGUNAN (Rp)	36.02%	-0.27%	-4.36%	12.47%	38.81%	80.42%

Sumber: IHPS BPKP Jabar (diolah)

Pertumbuhan APBD kabupaten Cirebon tahun anggaran 2013 s/d 2015 mengalami peningkatan terlebih dari pos pendapatan asli daerah yang menunjukkan peningkatan positif.

Penurunan pada tahun 2015 disebabkan turunnya realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibanding tahun 2014.

Selain pendapatan, pertumbuhan belanja pemerintah daerah kabupaten Cirebon yang terdiri dari belanja rutin (belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) juga mengalami pertumbuhan. Belanja rutin maupun belanja pembangunan daerah kabupaten Cirebon sama-sama memiliki rasio pertumbuhan yang berfluktuatif. Rasio pertumbuhan belanja rutin menurun di tahun 2013 sebesar 18,7% dibanding tahun anggaran 2014 sebesar 12,17%. Ini disebabkan pos-pos belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang mengalami kenaikan akibat pertumbuhan belanja pembangunan yang menurun

Dari analisis rasio pertumbuhan di atas, rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten Cirebon baik karena pemerintah daerah kabupaten Cirebon mampu dalam meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerahnya

Maka pemerintah daerah kabupaten Cirebon diharapkan dapat meminimalisasi anggaran untuk belanja rutin, agar pengalokasian untuk belanja pembangunan dapat lebih maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dengan tersedianya sarana dan prasarana.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat rasio kemandirian daerah kabupaten dan Kota Cirebon berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Hal tersebut terlihat dari rasio kemandirian kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang walaupun memiliki rata-rata yang masih rendah yakni sebesar 25%, namun secara keseluruhan rasio kemandirian telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Rasio efektivitas persentase rata-ratanya lebih dari 100% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah dapat dikatakan sangat efektif, rasio efisiensi kabupaten dan Kota Cirebon persentase rata-ratanya kurang dari 60% yang berarti pemerintah kabupaten Cirebon

dan Kota Cirebon sangat efisien dalam membiayai pengeluaran untuk memungut pendapatan asli daerah dengan maksimal.

Sedangkan dari rasio aktivitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin (belanja tak langsung) dibandingkan untuk belanja pembangunan (belanja langsung). Rasio pertumbuhan kabupaten dan Kota Cirebon menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami trend positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami trend negatif (Belanja Daerah).

Saran

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD kabupaten dan Kota Cirebon serta kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan Kota Cirebon antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Cirebon Dan Kota Cirebon harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
2. Pemerintah kabupaten Dan Kota Cirebon agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja rutin (belanja tak langsung) dan meningkatkan belanja pembangunan (belanja langsung).

DAFTAR PUSTAKA

_____, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

_____, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara.

- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Edisi 3, Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Mariani, Lidia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah. Artikel Ilmiah Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
- Damanhuri, Zulkifly Prabowo. ... Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Ulum, Ihyaul. 2005. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Malang: UMM Press.
- Bisma dan Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. GaneÇ Swara, Vol. 4, No.3, Desember 2010.
- Wahyuni, Nanik. ... Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang.